

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Salah satu penunjang terlaksananya program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pemotivasian, pengkoordinasian, pengendalian, dan penilaian kinerja¹.

Agar anggaran itu dapat dimanfaatkan dengan baik maka diperlukan suatu perencanaan awal yang baik pula dan dalam rangka mendukung *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.²

Penyerapan anggaran menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Kegagalan target dalam penyerapan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan

¹Baldric Siregar. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2015) hal 27

² Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika,2012). hal 106

sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.³

Masalah penyerapan anggaran terjadi juga di sektor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang kemajuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang maju tingkat pendidikan penduduknya. Indonesia sangat perduliterhadap dunia pendidikan, Sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 negara mempunyai amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah Daerah sebagai pengemban dan penerima urusan pendidikan di daerah harus menyiapkan sumber pendanaan untuk membiayai sektor pendidikan tersebut. Dalam menunjang keberhasilan dalam sektor pendidikan maka Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menerapkan Pagu awal belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam DPA 2015 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2015 sebesar Rp.261.750.292.298.

Pagu awal belanja Langsung sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai duabelas program yang ada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Duabelas program tersebut yaitu :

³Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat,2014), hal 96

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Anggaran

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN	TEREALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Program pendidikan anak usia dini	Rp.3.876.750.000	Rp.3.131.825.000	Rp.2.806.527.420 dengan persentase sebesar (89.61%)
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.129.944.797.194	Rp.69.190.058.320	Rp.61.809.597.051 dengan persentase sebesar (89.33%)
3	Program pendidikan menengah	Rp.31.640.933.751	Rp.26.562.141.600	Rp.17.002.094.100 dengan persentase sebesar 64.01%
4	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 4.483.200.000	Rp.4.380.600.000	Rp.3.693.496.210 dengan persentase sebesar 84.31 %
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 3.285.700.000	Rp. 2.375.620.000	Rp.2.375.620.000 Dengan persentase sebesar 88.71%
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 1.126.387.500	Rp. 3.123.977.973	Rp.2.210.807.470 dengan persentase sebesar 70.77%

7	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	Rp133.895.710.500	Rp. 133.895.710.500	Rp.133.000.760.000 Dengan persentase sebesar 99.99%
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.091.984.900	Rp.2.339.945.879,73	Rp.1.861.254.168,00 dengan persentase sebesar 79.54%
9	Program Peningkatan sarana Prasarana aparatur	Rp. 3.304.229.000	Rp. 5.074.676.500,	Rp3.930.531.460 Dengan persentase sebesar 77.45%
10	Program Fasilitas Purna Tugas PNS	Rp. 85.500.000,00	Rp. 85.500.000,00	Rp.33.150.000,00 Dengan persentase sebesar 38.77%
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.569.265.000	Rp. 1.601.169.300	Rp.1.325.475.800 Dengan persentase sebesar 82.78 %
12	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Rp. 887.850.000	Rp. 600.725.000	Rp.412.583.952de ngan persentase sebesar 68.68%

Sehingga Dari pagu anggaran belanja langsung Rp.261.750.292.298 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp.235.854.600.862 sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai Desember 2015 adalah sebesar 90,11%.

Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 12 program Dinas Pendidikan Kota Bandung, tidak terdapat (0.00%) program dengan capaian kinerja keuangannya sangat baik, sebanyak 3 (25%) program dengan capaian kinerja keuangannya baik, 2 (16.67%) program dengan capaian kinerja keuangannya cukup, 2 (16.67) program dengan capaian kinerja keuangannya kurang dan 7 (58.33%) program dengan capaian kinerja keuangannya sangat kurang.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada Duabelas program Dinas Pendidikan Kota Bandung selama tahun 2015:

Tabel 1.2
Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan
Tahun 2015

NO	Rentang Capaian Daya serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	Persentase
1	2	3	4	5
I	>90	Sangat Baik	-	
II	75.00-89.99	Baik	3	25,00%
III	65.00 – 74.99	Cukup	2	16,67%
IV	50.00 – 64.99	Kurang	2	16,67%
V	0 – 49.99	Sangat Kurang	7	58,33%

Dengan melihat fenomena penyerapan anggaran belanja langsung yang ada pada dinas pendidikan kota bandung dilihat dari pencapaian realisasi dari beberapa program kegiatan serta rekapitulasi pencapaian dari indikator kinerja keuangan, maka kondisi ini menarik minat penulis untuk melakukan

penelitian tentang “ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan identifikasi masalah apa saja faktor-faktor pengaruh penyerapan anggaran belanja langsung tahun anggaran 2015 pada dinas pendidikan Kota Bandung masih terdapat indikasi-indikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya perencanaan awal sehingga terdapat beberapa program kegiatan yang pencapaiannya kurang maksimal.
2. Terdapat kurangnya pengalokasian anggaran sebagai alat untuk mengoptimalkan anggaran.
3. Belum optimalnya beberapa program kegiatan dinas pendidikan kota bandung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mendukung penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung ?
2. Apa saja faktor yang menghambat penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu meliputi hal- hal berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita dalam keilmuan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan bagi peneliti, dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

2) Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Munaqasah Strata Satu (S1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mereka (mahasiswa) lain yang akan menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang lebih baik.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berkaitan mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan konsep pemikiran segitiga terbalik, Dimana konsep ini dimulai dari *Grand Theor* yaitu Keuangan Negara, *Middle Theory* yaitu Anggaran, dan *Operasional Theory* yaitu Penyerapan Anggaran. Seperti dibawah ini :

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Dimana *Grand Theory* yang digunakan yaitu Keuangan Negara dengan menggunakan teori dari Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintah.

Middle Theori yaitu Anggaran dengan menggunakan teori dari Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menyebutkan bahwa Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Operasional Theory yaitu Penyerapan Anggaran dengan menggunakan teori dari Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Sektor Publik menyebutkan bahwa penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat tertentu.

Berikut ini merupakan kajian teori yang akan digunakan :

Gambar 1.2
Kerangka Teori

